ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan kejahatan baru seperti ancaman penyebaran video skandal yang merusak reputasi korban serta berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Ada dua hal yang diangkat dan menjadi fokus penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Ancaman Penyebaran Video Skandal dalam Undang-Undang (ITE) Nomor 1 Tahun 2024. *Kedua*, Bagaimana Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang (ITE) Nomor 1 Tahun 2024 Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban ancaman penyebaran video skandal menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2024 serta Perspektif Hukum Pidana Islam. Metode penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis Normatif*. Jenis sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) lalu dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE No. 1 Tahun 2024 memberikan perlindungan hukum bagi korban melalui sanksi pidana dan denda, namun implementasinya masih terdapat tantangan, terutama dalam penegakan hukum dan perlindungan privasi. Dalam hukum pidana Islam, ancaman penyebaran video skandal untuk pemerasan merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan dapat termasuk hirabah maknawi. Meski tidak memenuhi syarat hudud, maka pelaku dikenakan sanksi ta'zir.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Video Skandal, Undang-Undang ITE No.1 Tahun 2024, Hukum Pidana Islam.*